

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris, yang sumber utama mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Pertanian merupakan salah satu sektor paling strategis karena berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kusumaningrum, 2019). Indonesia memiliki potensi alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat. Sektor pertanian mempunyai tujuan khusus untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan keragaman produk pertanian. Hal tersebut bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat. Meningkatkan produktivitas pertanian berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga meskipun sumber daya yang dimiliki terbatas, tetap dapat menghasilkan produksi yang diinginkan. (Salim *et al.*, 2019).

Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam setiap usaha pertanian, yaitu kebutuhan akan pembiayaan (uang) untuk membiayai operasional usahatani. Kebutuhan pembiayaan pertanian dimulai dari biaya permodalan, biaya saat berlangsungnya usahatani hingga biaya pemasaran. Ketiadaan dan kekurangan pembiayaan dalam pertanian dapat membatasi ruang gerak petani. Solusi yang dapat dilakukan oleh petani adalah dengan meminjam uang kepada lembaga keuangan. Terutama bagi petani kecil, meminjam uang telah menjadi hal yang wajib (Widhiyanto *et al.*, 2018). Pembiayaan pertanian berguna untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan memenuhi kebutuhan pangan (Kiros dan Meshesha, 2022). Namun, petani memiliki akses yang sangat terbatas terhadap lembaga keuangan, terutama bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan sempit dan berada di pedesaan (Pratiwi *et al.*, 2019). Peningkatan akses petani terhadap pembiayaan dapat meningkatkan pembelian sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, dan lainnya sehingga dapat mendorong peningkatan produksi usahatani dan berdampak pada tingkat pendapatan petani (Sekyi *et al.*,

2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi akses petani terhadap sumber pembiayaan, yaitu faktor internal dan faktor ekonomi (Yoko & Prayoga, 2019). Lembaga keuangan berperan penting dalam membiayai input produksi sampai tahap pasca panen untuk meningkatkan pendapatan petani (Septiani *et al.*, 2020).

Pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan formal dan informal. Pembiayaan formal adalah pembiayaan yang disediakan oleh lembaga berbadan hukum sedangkan pembiayaan informal adalah pembiayaan yang disediakan oleh lembaga yang tidak berbadan hukum (Rahayu, 2015). Selain itu, perbedaan pembiayaan formal dan informal terletak pada pengambilan keputusan. Pembiayaan formal menggunakan UUD sebagai dasar peraturannya sedangkan pembiayaan informal bebas dalam peraturannya. Pembiayaan formal biasanya berasal dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pegadaian, dan sebagainya. Pembiayaan informal biasanya berasal dari bandar/tengkulak, pelepas uang/rentenir, kelompok tani, keluarga, tetangga, dan sebagainya. Sebagai pembiayaan formal berikut jumlah Bank yang terdapat di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Bank di Indonesia, Tahun 2018 - 2021

Indikator	2018	2019	2020	2021
Jumlah Bank				
Bank Umum	115	110	109	107
Bank Perkreditan Rakyat	1.764	1.709	1.669	1.632
Jumlah Kantor				
Bank Umum	31.609	31.127	30.733	32.531
Bank Perkreditan Rakyat	6.768	6.562	6.540	6.530

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah bank di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 – 2021 jumlah Bank Umum di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 1,83 % dan Bank Perkreditan Rakyat mengalami penurunan sebanyak 2,21%. Hal tersebut disebabkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank. Penurunan jumlah kantor bank dapat menyebabkan penghambatan terhadap akses pembiayaan dikarenakan jarak kantor bank yang semakin jauh dari pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah pilihan tambahan dari lembaga keuangan formal yang dapat digunakan untuk membiayai operasi segmen-mikro. (Johar, 2014). Berikut Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terdapat di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah LKM di Indonesia, Tahun 2018 - 2021

Keterangan	2018	2019	2020	2021
Konvensional	123	129	148	146
Koperasi	101	100	106	103
PT	22	29	42	43
Syariah	60	75	80	81
Koperasi	59	74	79	80
PT	1	1	1	1
Total	183	204	228	227

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa LKM di Indonesia mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2020 – 2021 jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengalami penurunan sebanyak 0,43%. Petani kecil pada umumnya enggan untuk mengakses pembiayaan formal disebabkan banyak dan sulitnya persyaratan yang diajukan serta adanya jaminan yang harus dimiliki oleh petani (Aisah dan Wulandari, 2020). Hal tersebut berbanding terbalik dengan akses pada pembiayaan informal. Pembiayaan informal lebih bersifat fleksibel dan cenderung mudah untuk diakses karena didasari pada asas kepercayaan serta penerapannya yang menggunakan kebijakan dan peraturannya sendiri. Namun, tetap adanya akad atau perjanjian di awal proses peminjaman antara petani dan lembaga informal. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan

pada sumber pembiayaan informal. Biasanya keuntungan yang diberikan berupa bagi hasil maupun bunga pinjaman.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra pertanian di Indonesia. Beberapa komoditas unggul dihasilkan di Jawa Barat yang salah satunya adalah tanaman kentang. Tanaman kentang (*Solanum tuberosum L.*) adalah tanaman umbi yang memiliki sumber karbohidrat tinggi sehingga dapat menjadi alternatif bagi bahan pangan selain padi, gandum, dan jagung. Tidak hanya itu, tanaman kentang adalah komoditas hortikultura yang bernilai tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah, wilayah Jawa Barat menempati urutan ketiga sebagai produsen utama kentang nasional yang mencapai 240.481,7 ton. Berikut merupakan jumlah produksi kentang di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tabel 3. Jumlah Produksi Kentang di Jawa Barat, Tahun 2018 – 2021

Kabupaten	Produksi (Ton)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Garut	173.047,6	156.226,6	121.314,4	160.944,7
Kabupaten Bandung	85.783,4	81.654,3	65.215,2	70.678,2
Kabupaten Sumedang	3.600,5	4.193,2	7.255,9	5.645,4
Kabupaten Majalengka	1.449,2	1.179	874,3	1.078
Kabupaten Bandung Barat	1.530	1.890	1.995	1.770
Jawa Barat	265.535,9	244.892,1	196.856,3	240.481,7

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung adalah wilayah produksi kentang terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat, setelah Kabupaten Garut. Produksi kentang di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya yang dimana pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan produksi sebanyak 24% dan mengalami kenaikan 8% pada tahun 2021. Tanaman kentang yang merupakan salah satu komoditas andalan di Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Pangalengan yang menjadi salah satu sentra produksi kentang bagi wilayah

Kabupaten Bandung. Menurut data BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2021, Kecamatan Pangalengan merupakan kecamatan dengan jumlah produksi dan luas lahan untuk tanaman kentang terbesar di Kabupaten Bandung. Berikut merupakan luas lahan, produksi, dan produktivitas kentang di beberapa kecamatan di Jawa Barat.

Tabel 4. Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kentang di Kabupaten Bandung Tahun 2021

Kecamatan	Luas Lahan (Hektar)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Hektar)
Kecamatan Pangalengan	2.440	52,165.40	21.38
Kecamatan Kertasari	403	7,753.30	19.24
Kecamatan Paseh	158	3,208.20	20.31
Kecamatan Cimenyan	204	4,171.10	20.45
Kecamatan Lainnya	185	3,380.20	18.27
Total Kabupaten Bandung	3.390	70,678.20	20.85

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung 2021

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Kecamatan Pangalengan memproduksi kentang sebanyak 52.165,4 ton yang merupakan 73,8% dari total produksi kentang di Kabupaten Bandung serta luas lahan sebesar 2.440 hektar atau setara dengan 71,9% dari luas lahan total di Kabupaten Bandung. Untuk dapat meningkatkan hasil produksi pertanian tentu saja petani membutuhkan modal lebih untuk usaha taninya. Di wilayah Kecamatan Pangalengan terdapat beberapa lembaga keuangan yang dapat diakses oleh petani sebagai peminjaman modal usahatani. Berikut merupakan jumlah lembaga keuangan yang terdapat di Kecamatan Pangalengan.

Tabel 5. Jumlah Lembaga Keuangan di Kecamatan Pangalengan, Tahun 2019 – 2021

Lembaga Keuangan	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)
Bank Umum Pemerintah	3	4	3
Bank Umum Swasta	4	4	4
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	3	3	3
Koperasi Unit Desa (KUD)	1	1	1
Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)	0	0	1
Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	0	0	7
Koperasi Lainnya	63	34	16
Pegadaian	1	1	0
Jumlah	75	47	35

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir telah terjadi penurunan secara signifikan dari tahun 2019 – 2021 sebanyak 40 unit atau setara dengan 53%. Diharapkan bahwa ketersediaan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan formal maupun informal, akan membantu petani mendapatkan modal tambahan untuk usahatani. Desa Margamulya yang berada di Kecamatan Pangalengan memiliki beberapa lembaga keuangan formal dan informal. Berikut lembaga keuangan yang terdapat di Desa Margamulya.

Tabel 6. Jumlah Lembaga Keuangan di Desa Margamulya, Tahun 2021

Desa/Kabupaten	Bank Umum	Bank Perkreditan Rakyat	Koperasi Lainnya	Lembaga Keuangan Non Bank	Pegadaian
Margamulya	0	1	3	0	0
Jumlah	0	1	3	0	0

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa Desa Margamulya total mempunyai 4 lembaga keuangan yang bersifat formal. Ketersediaan lembaga keuangan tersebut tidak membuat petani dapat memanfaatkan lembaga keuangan secara optimal sebagai akses pinjaman pembiayaan. Sumber pembiayaan formal lebih banyak diakses oleh golongan petani yang memiliki lahan luas (Rahayu, 2015). Petani kentang di Desa Margamulya cenderung enggan untuk memilih akses pembiayaan formal karena dianggap lebih sulit dan lama¹. Oleh Karena itu, lebih banyak petani yang melakukan akses terhadap pembiayaan informal (Elahi *et al.*, 2018). Pembiayaan informal yang berada di Desa Margamulya biasa disebut dengan bandar. Pembiayaan yang diberikan oleh bandar terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan sebagian (maksimal 50%) dan pembiayaan keseluruhan dari proses usahatani. Menurut Sartika dan Karyani (2018), penelitian pada tanaman kopi, proses pemilihan petani terhadap akses pembiayaan informal umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia, pendidikan, pengalaman usahatani, jumlah pohon, dan pendapatan. Dalam satu kali penanaman, tanaman kopi memiliki beberapa kali masa produksi sedangkan pada tanaman kentang yang merupakan tanaman semusim hanya memiliki satu kali produksi dan akan mati setelahnya.

Permasalahan petani kentang di Desa Margamulya terhadap pembiayaan formal adalah sulitnya akses peminjaman disebabkan harus adanya jaminan (seperti sertifikat kepemilikan tanah dan BPKB kendaraan bermotor), sedangkan pada pembiayaan informal petani hanya diharuskan untuk mempunyai lahan yang akan ditanam. Namun, apabila dihitung kembali pembiayaan informal memberikan keuntungan yang lebih kecil terhadap petani.²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akses Pembiayaan Informal Petani Kentang di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung” karena menurut hasil penelusuran bahwa petani cenderung lebih banyak untuk mengakses pembiayaan

¹ Wawancara dengan petugas Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), pada tanggal 5 Desember 2022.

² Wawancara dengan petugas Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), pada tanggal 5 Desember 2022.

informal daripada pembiayaan formal (Pratiwi *et al.*, 2019). Penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat membantu petani kentang di Kecamatan Pangalengan dalam mengakses modal untuk usaha taninya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah disusun, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana akses petani kentang terhadap pembiayaan informal di Desa Margamulya?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi petani mengakses pembiayaan informal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi akses petani kentang terhadap pembiayaan informal di Desa Margamulya.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi petani mengakses pembiayaan informal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wadah dalam pengaplikasian ilmu selama menempuh pendidikan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran serta dapat menambah ilmu pembiayaan dalam bidang pertanian.
2. Petani kentang, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan membantu petani kentang dalam mengakses sumber pembiayaan.